



~~~~~

# Kesesuaian Tingkat Komponen dalam Negeri Indonesia dengan Komitmen International Bidang Perdagangan dan Investasi

~~~~~

*Webinar Kebijakan TKDN di Indonesia: Peluang
dan Tantangan*
21 November 2024

Junianto James Losari
PhD Candidate – School of law
City University of Hong Kong



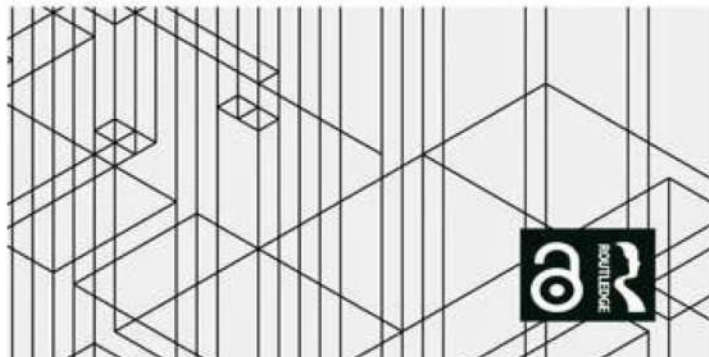
OPEN ACCESS



**LOCAL CONTENT
REQUIREMENTS**

PROMISES AND PITFALLS

Edited by
Lili Yan Ing and Gene M. Grossman



Chapter 6

Conformity of Indonesia's Local Content Requirements with its Trade and Investment Commitments

Michelle Limenta, Lili Yan Ing, Junianto James Losari, and Oscar Fernando

Bahasan



1

TKDN sebagai bagian dari kebijakan industri Indonesia

2

Analisis Kesesuaian

3

Refleksi ke Depan

TKDN sebagai bagian dari kebijakan industrial Indonesia



Perpres No. 2 tahun 2009 tentang Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pemenuhan syarat TKDN, termasuk sertifikasi gratis TKDN



Perpres No. 74 tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional

Peningkatan daya saing dan produktivitas melalui peningkatan nilai tambah dan teknologi produk manufaktur lokal.

Cakupan di berbagai sektor

Pertambangan, manufaktur, otomotif (kendaraan listrik), farmasi, dan telekomunikasi.

Contoh Kebijakan TKDN Indonesia

Gadget

Terjawab Kapan iPhone 16 Masuk Indonesia, Alasan Belum Keluar dan Rilis, Harga HP iPhone 16 Pro Max

Tayang: Kamis, 24 Oktober 2024 15:10 WITA

Editor: Doan Pardede



IPHONE 16 RILIS - terjawab sudah kapan iPhone 16 masuk Indonesia, alasan belum keluar dan rilis, harga HP iPhone 16 Pro Max.

Kemenperin: Target TKDN Kendaraan Listrik 80 Persen pada 2030

fea | CNN Indonesia

Minggu, 10 Sep 2023 01:15 WIB

TELEKOMUNIKASI



Larangan penjualan dan distribusi perangkat telekomunikasi yang belum memenuhi syarat TKDN (35%).



Jalan untuk mendorong perusahaan perangkat telekomunikasi untuk berinvestasi di Indonesia

OTOMOTIF



Penerapan syarat TKDN untuk kendaraan listrik berbaterai di Indonesia, dengan tahapan tertentu



Pada tahun 2023, Perpres No. 79/2023 memberikan kelonggaran dengan memundurkan target TKDN (40% sampai 2026, sebelumnya sampai 2023).



18 Perjanjian
Perdagangan
Internasional



ANALISIS KESESUAIAN



39 Perjanjian
Investasi
Internasional

Analisis Kesesuaian - Perdagangan

Komitmen sehubungan dengan TKDN

- Prinsip *national treatment* dalam perjanjian perdagangan barang dan jasa
- Larangan syarat-syarat pelaksanaan (*performance requirements*) dalam the *Agreement on Trade-Related Investment Measures* (TRIMs)
- Larangan subsidi berdasarkan *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*

Studi Kasus TKDN untuk Pengembangan Infrastruktur Listrik

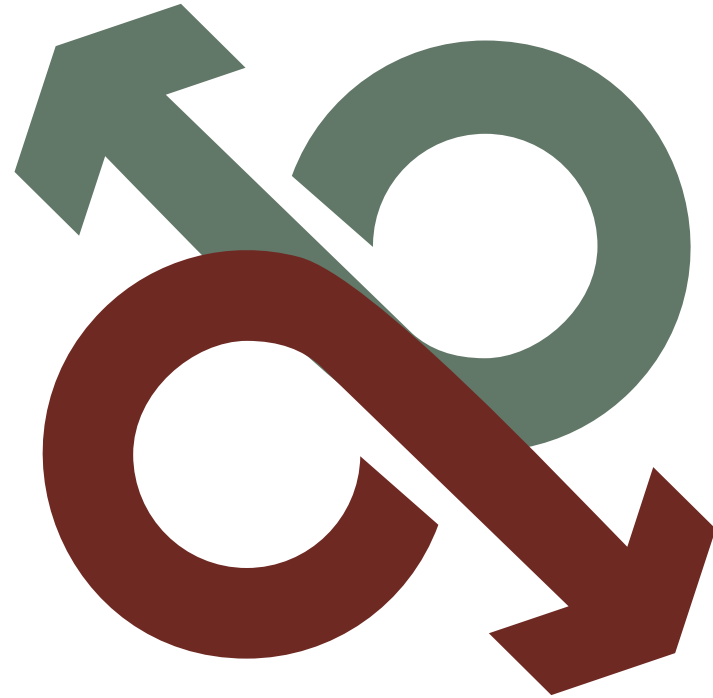
- PERMEN EDSM No. 11/2024
- Berlaku bagi BUMN (*state-owned enterprises*) dan juga investor swasta yang memenuhi syarat tertentu
- Ketentuan ini dapat melanggar kewajiban *national treatment* dan TRIMs
- Eksepsi pengadaan pemerintah (GATT Pasal III:8) – syarat non-komersial mungkin tidak terpenuhi apabila produk akhir (listrik) dijual secara komersial.
- Tidak melanggar larangan subsidi kalau tidak ada harga preferensial atau isentif pajak.



Analisis Kesesuaian - Investasi

Komitmen sehubungan dengan TKDN

- Prinsip *national treatment*
- Larangan syarat-syarat pelaksanaan (*performance requirements*)



Studi Kasus TKDN untuk Sektor Telekomunikasi

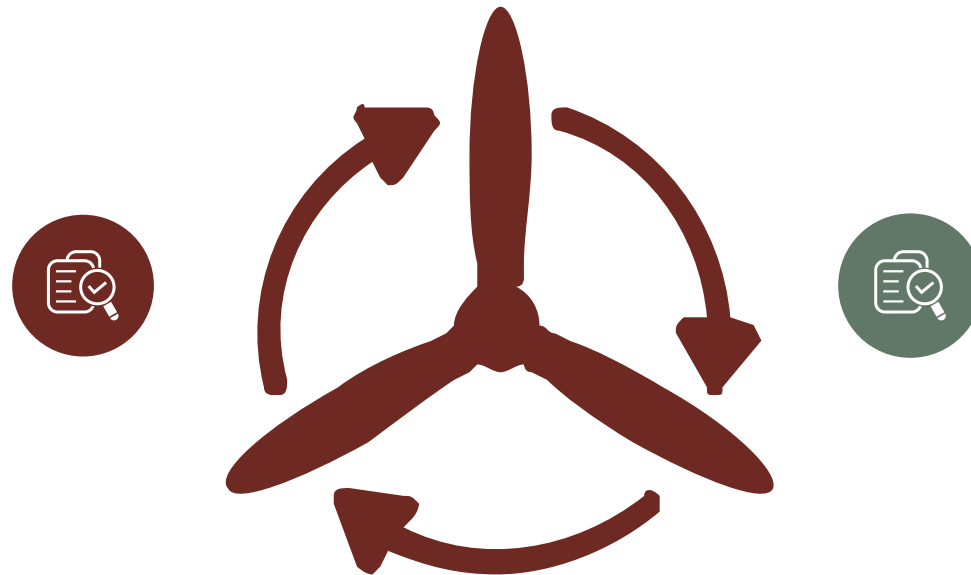
- Permenkominfo No. 13 tahun 2021 – 35%
- Kemungkinan **tidak melanggar** kewajiban *national treatment (prima facie)* – ketentuan khusus ditargetkan bagi penggunaan komponen dalam negeri.
- Kemungkinan **melanggar** *performance requirements prohibition* – ketentuan TKDN mengharuskan penggunaan bahan baku dalam negeri dengan persentase tertentu.
- Pengecualian mungkin tersedia.

Kasus Terhadap Indonesia



Refleksi ke Depan

Dengan adanya kewajiban dan komitmen di bidang perdagangan dan investasi, pemerintah Indonesia harus siap apabila ada klaim yang dibawa atas ketentuan TKDN.



Evaluasi terhadap TKDN?

Langkah-langkah lain untuk menarik investasi asing di bidang yang dapat meningkatkan nilai tambah (beberapa telah dinyatakan pula dalam Perpres 74/2022):

- Memperjelas rangka hukum yang berlaku (legal framework) dan memastikan penegakan hukum berdasarkan *rule of law*.
- Mengembangkan sumber daya manusia.
- Mengembangkan infrastruktur yang mendukung industri.